

G7 Respon Tegas Peluncuran Rudal Balistik Korut

JAKARTA(IM)-Negara-negara besar dunia yang tergabung dalam kelompok tujuh atau G7 mengatakan bahwa komunitas internasional memerlukan respons yang tegas dan terpadu terhadap pengembangan nuklir dan peluncuran rudal Korea Utara (Korut) yang dinilai "sombro".

Melansir CNA, Kamis (21/12), para menteri luar negeri G7 mengatakan, setelah peluncuran rudal balistik paling kuat milik Pyongyang bahwa "tindakan sombron Korut yang berulang kali harus ditanggapi dengan tanggapan internasional yang cepat, bersatu dan kuat, khususnya oleh Dewan Keamanan PBB.

Korut pada hari Senin (18/12), melakukan uji coba rudal balistik antarbenua teranggihnya yang berpotensi mencapai Amerika Serikat (AS). Korut mengatakan bahwa pemimpinnya Kim Jong-un mengawasi peluncuran tersebut dan memperingatkan Washington, yang telah memperkuat hubungan dengan Korea Selatan, agar tidak membuat "keputusan yang salah".

Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi banyak resolusi yang menyerukan Korea Utara untuk menghentikan program nuklir dan rudal balistiknya sejak pertama kali melakukan uji

coba nuklir pada tahun 2006. Namun China, mitra terdekat Korut, dan Rusia, yang keduanya memegang hak veto di Dewan Keamanan menentang pengetatan sanksi lebih lanjut.

Dalam langkah terbaru untuk meningkatkan kerja sama tiga arah, Jepang, Korea Selatan, dan AS pada hari Selasa (19/12), mengaktifkan sistem untuk berbagi data real-time mengenai peluncuran rudal Korut, yang disepakati pada pertemuan puncak para pemimpin ketiga negara pada bulan Agustus.

AS juga mengatakan bahwa salah satu utusannya yang menangani Korut berbicara melalui telepon pada hari Selasa (19/12), dengan rekan-rekannya dari Jepang dan Korea Selatan dan setuju bahwa peluncuran tersebut "merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia".

Dalam sebuah pernyataan, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa rekannya dari Jepang dan Korea Selatan "implementasi penuh" resolusi Dewan Keamanan dan juga mendesak "kembali keterlibatan diplomatik" oleh Korut, yang tidak menunjukkan minat dalam pembicaraan dengan pemerintahan Presiden AS Joe Biden. ● **gul**

Venezuela Bebaskan 21 Tahanan Politik, Termasuk 8 Warga Negara AS

CARACAS(IM)-Koalisi untuk Hak Asasi Manusia dan Demokrasi mengatakan pihak berwenang Venezuela membebaskan 21 'tahanan politik'. Sebanyak 8 tahanan di antaranya adalah warga negara Amerika Serikat (AS).

"Delapan warga Amerika dan 13 warga Venezuela," kata seorang pengacara kelompok tersebut, Maria Alejandra Poleo, seperti dilansir AFP, Kamis (21/12).

Tahanan yang dibebaskan itu termasuk mantan tentara AS Luke Alexander Denman dan Airan Berry, yang menjalani hukuman 20 tahun penjara. Mereka dihukum karena invasi bersenjata yang gagal ke Venezuela pada tahun 2020.

Denman dan Berry dituduh berusaha menggulingkan Presiden Nicolas Maduro, setelah mereka dan orang-orang bersenjata lainnya tiba dengan perahu di Macuto pada Mei 2020.

Maduro mengklaim bahwa mantan presiden AS Donald Trump berada di balik serangan itu, yang diduga menewaskan delapan penyerang. Menurutnya aksi itu bertujuan untuk men-

gangkat pemimpin oposisi Juan Guaido untuk menggantikannya.

AS telah membantah terlibat atas peristiwa itu.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dia mengharapkan kabar baik mengenai warga Amerika yang ditahan di Venezuela. Hal itu menyusul meredanya ketegangan dengan Maduro.

"Kami ingin memastikan rekan-rekan Amerika kami dibebaskan. Kami juga fokus pada tahanan politik di Venezuela, dan berusaha memastikan pembebasan mereka," kata Blinken kepada wartawan.

"Kami mempunyai banyak pekerjaan yang sedang dilakukan, di kedua bidang tersebut, saat ini. Dan kami berharap mempunyai kabar baik untuk dibagikan, mungkin nanti hari ini," imbuhnya.

Media AS melaporkan bahwa Caracas telah merundingkan pembebasan tersebut dengan imbalan pengusaha Kolombia Alex Saab, yang diekstradisi ke AS pada tahun 2021 di mana ia menghadapi tuduhan pencucian uang. ● **ans**

Israel Tawarkan Gencatan Senjata, Imbalannya Pembebasan Sandera

YERUSALEM(IM)-Pemerintah Israel dilaporkan telah menawarkan perjanjian gencatan senjata kepada Hamas, yang akan berlangsung selama satu minggu di Jalur Gaza.

Ini sebagai bagian dari perjanjian baru yang bertujuan untuk membebaskan lebih dari 30 sandera yang ditahan oleh kelompok tersebut.

Sebelumnya Al Arabiya, Kamis (21/12), situs berita Axios yang mengutip para pejabat Israel, melaporkan bahwa usulan tersebut disampaikan melalui mediator Qatar. Ini merupakan tawaran pertama sejak tumbangnya perjanjian bulan lalu yang mengakibatkan penghentian perang selama tujuh hari dan pembebasan lebih dari 100 sandera.

Pada hari Selasa, Presiden Israel Isaac Herzog mengumumkan bahwa Israel bersiap untuk jeda kemanusiaan kedua dalam pertempuran dengan Hamas, dengan imbalan pembebasan lebih banyak sandera yang ditahan di Gaza, demikian Times of Israel melaporkan.

"Para pejabat Israel mengatakan usulan tersebut menunjukkan Israel bertekad untuk meluncurkan kembali perundingan serius untuk pembebasan lebih banyak sandera, meskipun Hamas telah mengatakan bahwa mereka tidak akan melanjutkan perundingan selama pertempuran terus berlanjut," lapor Axios.

Laporan tersebut merinci pertemuan di Warsawa antara Direktur CIA Bill Burns, Perdana Menteri Qu-

tar Mohammed bin Abdulrahman, dan David Barnea, kepala agen mata-mata Israel Mossad, untuk membahas potensi kesepakatan.

Usulan Israel tersebut mencakup pembebasan para perempuan yang masih sandera Hamas, laki-laki berusia di atas 60 tahun, dan sandera lain yang sakit atau terluka parah dan membutuhkan perawatan medis segera.

Sebagai bagian dari proposal tersebut, Israel mengatakan akan menyetujui gencatan senjata sementara setidaknya selama satu minggu, kata para pejabat Israel... Israel juga menyatakan kemungkinan akan membebaskan tahanan Palestina yang dihukum karena serangan yang lebih serius terhadap Israel dibandingkan mereka yang dibebaskan berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Para pejabat Israel mengatakan ada puluhan tahanan Palestina yang sudah tua atau sakit, dan mereka bisa dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan kemanusiaan," lapor Axios.

Dalam pertemuan di Warsawa, Perdana Menteri Qatar menyampaikan posisi Hamas bahwa Israel harus menghentikan serangannya sebelum negosiasi perantara dapat dimulai. Barnea menjawab "Jika Hamas ingin perang dihentikan, mereka harus meletakkan senjatanya dan menyerahkan para pemimpinnya di Gaza yang bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober terhadap Israel yang memicu perang" ● **tom**



TENTARA TIONGKOK KERAHKAN PASUKAN PENYELAMAT PADA GEMPA GANSU

Tentara Tiongkok membersihkan puing-puing di Desa Chenjia di Kotapraja Dahejia, Kab. Jishishan, Prov. Gansu, Tiongkok, Rabu (20/12). Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) dan Pasukan Polisi Bersenjata Rakyat (PAPF) mengerahkan pasukan penyelamat untuk membantu korban gempa berkekuatan 6,2 yang mengguncang Prov. Gansu, Tiongkok pada Senin (18/12) malam.

Uni Eropa Sepakati Peraturan Baru Mengenai Imigrasi

Kedatangan migran di Uni Eropa sudah jauh menurun dibanding saat puncaknya pada 2015.

BRUSSELS(IM)- Uni Eropa mencapai kesepakatan mengenai peraturan baru yang dirancang untuk membagi biaya dan pekerjaan dalam menampung para migran secara lebih merata dan membatasi jumlah orang yang masuk.

Perwakilan Parlemen Eropa dan pemerintah Uni Eropa mencapai kesepakatan setelah melakukan pembicaraan sepanjang malam mengenai undang-undang kolektif Uni Eropa yang disebut Pakta Baru tentang Migrasi dan Suaka. Undang-undang ini akan mulai berlaku tahun depan.

Undang-undang tersebut mencakup penyiangan migran tidak resmi ketika mereka tiba di Uni Eropa, prosedur untuk menangani permohonan suaka, aturan untuk menentukan negara Uni Eropa mana yang bertanggung jawab untuk menangani permohonan tersebut dan cara-cara untuk menangani krisis.

Kedatangan migran di Uni Eropa sudah jauh menurun dibanding saat puncaknya pada 2015 yang mencapai lebih dari 1 juta orang.

Tetapi terus merangkak naik dari titik terendah pada

tahun 2020 menjadi 255 ribu pada tahun ini hingga November. Lebih dari separuhnya menyeberangi Mediterania dari Afrika, terutama ke Italia.

Menteri Dalam Negeri Italia Matteo Piantedosi menyebut pakta tersebut sebagai "kesuksesan besar" bagi Eropa dan Italia. Ia mengatakan dengan undang-undang ini negara-negara perbatasan Uni Eropa yang paling terpapar migrasi tidak akan lagi merasa sendirian.

Sebelumnya Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan kesepakatan ini melegakan negara-negara yang terkena dampaknya imigrasi termasuk Jerman.

Upaya-upaya sebelumnya untuk membagi tanggung jawab menampung para migran mengalami kegagalan. Karena anggota Uni Eropa

khususnya di wilayah timur tidak mau menerima orang-orang yang tiba di Yunani, Italia dan negara-negara lain.

Dengan sistem yang baru, negara-negara yang tidak berada di perbatasan harus memilih antara menerima 30 ribu pemohon suaka atau membayar setidaknya 20 ribu euro atau 21.870 dolar AS per orang ke dana Uni Eropa. Sistem penyiangan diharapkan dapat membedakan antara mereka yang membutuhkan perlindungan internasional dan yang tidak.

Orang-orang yang permohonan suakanya memiliki peluang kecil untuk berhasil, seperti mereka yang berasal dari India, Tunisia, atau Turki dapat dicegah untuk memasuki Uni Eropa dan ditahan di perbatasan, seperti halnya

orang-orang yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan. Pemrosesan aplikasi juga akan dipercepat.

Amnesty International mengatakan pakta ini akan membuat hukum suaka Uni Eropa mundur beberapa dekade dan menyebabkan penderitaan yang lebih besar bagi orang-orang yang mencari suaka dan merupakan sistem yang dirancang untuk mempersulit orang untuk mengakses keamanan.

"Pakta ini hampir pasti akan menyebabkan lebih banyak orang dimasukkan ke dalam penahanan de facto di perbatasan Uni Eropa, termasuk keluarga dengan anak-anak dan orang-orang yang berada dalam situasi yang rentan," katanya dilansir the Associated Press. ● **tom**

Pelajar Korsel Gugat Pemerintah karena Ujian Masuk Perguruan Tinggi Berakhir 90 Detik Lebih Awal

SEOUL(IM)-Sekelompok pelajar Korea Selatan menggugat pemerintah, karena ujian masuk perguruan tinggi mereka berakhir 90 detik lebih awal dari yang dijadwalkan.

Mereka meminta masing-masing ganti rugi 20 juta won (Rp 200 juta) – biaya belajar satu tahun untuk mengikuti kembali ujian. Insiden tersebut mempengaruhi ujian siswa lainnya, kata pengacara mereka.

Gugatan tersebut, yang diajukan pada hari Selasa (19/12) lalu oleh setidaknya 39 siswa, mengklaim bahwa bel berbunyi lebih awal di lokasi ujian di ibu kota Seoul selama mata pelajaran pertama ujian bahasa Korea.

Beberapa siswa langsung memprotes, namun mengatakan pengawas masih mengambil kertas mereka. Para guru menyadari kesalahannya sebelum sesi berikutnya dimulai, dan memberikan waktu satu setengah menit saat istirahat makan siang, namun mereka hanya dapat menandai

kolom kosong yang tersisa di kertas mereka, dan tidak diperbolehkan mengubah jawabannya yang ada.

Para siswa mengatakan mereka sangat kecewa sehingga mereka tidak bisa fokus pada sisa ujian, lapor kantor berita Yonhap. Beberapa dilaporkan menyerah dan kembali ke rumah.

Melansir BBC Internasional, Kamis (21/12), pengacara mereka, Kim Woo-suk, mengatakan kepada media lokal bahwa otoritas pendidikan belum meminta maaf.

Stasiun penyiaran publik KBS mengutip pejabat yang mengatakan pengawas yang bertanggung jawab atas pusat tes tertentu telah salah membaca waktu.

Ini bukan pertama kalinya mahasiswa menggugat karena bel berbunyi terlalu dini. Pada bulan April, pengadilan di Seoul memberikan 7 juta won (Rp 70 juta) kepada siswa yang mengaku dirugikan pada ujian Suneung 2021 karena bel mereka berbunyi sekitar dua menit

lebih awal.

Dan harganya bisa lebih tinggi lagi di negara lain. Pada tahun 2012, seorang pria di Tiongkok dijatuhi hukuman percobaan satu tahun karena membunyikan bel empat menit 48 detik lebih awal saat ujian masuk perguruan tinggi nasional di sebuah sekolah di provinsi Hunan.

Tes masuk perguruan tinggi Korea Selatan, yang dikenal sebagai Suneung, adalah ujian maraton selama delapan jam dengan ujian berturut-turut dalam berbagai mata pelajaran.

Suneung adalah salah satu ujian tersulit di dunia dan taruhannya sangat tinggi.

Hal ini tidak hanya menentukan penempatan di universitas dan pekerjaan, tetapi juga menentukan hubungan di masa depan. Sejumlah langkah untuk membantu siswa berkonsentrasi dilakukan dalam acara tahunan tersebut seperti menutup wilayah udara negara, dan menunda pembukaan pasar saham. ● **ans**

Alot, Voting DK PBB Soal Perang Israel-Hamas Ditunda Lagi!

GAZA(IM)-Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk ketiga kalinya, menunda lagi pemungutan suara atau voting soal resolusi gencatan senjata di Jalur Gaza.

Dilansir dari CNN, Kamis (21/12), keraguan Amerika Serikat (AS) disebut sebagai salah satu penyebab mengapa rancangan resolusi tak kunjung disepakati dan voting ditunda.

Voting awalnya dijadwalkan pada Senin, kemudian ditunda ke Selasa, lalu ditunda lagi ke Rabu. Voting kemarin pun akhirnya ditunda lagi.

Dalam negosiasi yang alot itu, AS disebut enggan menandatangani rancangan resolusi, yang berarti mereka bakal 'menegur' Israel atas serangannya ke Jalur Gaza.

Seorang sumber anonim mengatakan, isu-isu utama dalam rancangan resolusi tersebut masih dalam tahap negosiasi, terutama pembahasan soal kalimat 'penghentian permusuhan' dan seruan kepada PBB untuk membentuk mekanisme pemantauan di bawah kendali PBB.

Rancangan resolusi ini juga menyebutkan adanya Two State Solution atau Solusi Dua Negara antara Israel dan Palestina, yaitu Jalur Gaza dan Tepi Barat yang nantinya akan berada di bawah Otoritas Palestina.

Sementara itu, Sejumlah diplomat yang terlibat pembahasan mengatakan, perubahan kalimat dalam resolusi tersebut sangat mungkin dilakukan un-

tuk bisa memperoleh dukungan AS atau setidaknya AS abstain dan tidak mengeluarkan hak vetonya.

Jika AS mengeluarkan hak veto lagi, berarti resolusi tersebut tidak dapat disahkan, sama seperti resolusi 8 Desember lalu.

"Kami masih membahas modalitas resolusi tersebut. Penting bagi kami agar seluruh dunia memahami apa yang dipertaruhkan di sini dan apa yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober lalu dan bagaimana Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri terhadap ancaman tersebut," ucap Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby.

Sementara itu, Presiden AS Joe Biden, mengatakan, AS kemungkinan akan menyetujui resolusi DK PBB tersebut. "Saat ini kami sedang melakukan negosiasi di PBB mengenai bentuk resolusi yang mungkin dapat kami setujui," kata Biden.

Sementara itu, juru bicara PBB Stephane Dujarric menyuarakan keprihatinan atas melonjaknya jumlah korban jiwa dalam peperangan di Jalur Gaza yang kini sudah menembus 20 ribu. Dia mengatakan, angka tersebut tak dapat diterima.

"Jumlahnya tidak dapat diterima dan sangat besar serta tidak jelas, dan kata sifat apa pun yang ingin Anda gunakan selama beberapa waktu," kata Dujarric kepada awak media, Rabu (20/12), di laporan Anadolu Agency. ● **tom**



PASCA KEBAKARAN DAERAH KUMUH DI MANILA

Anak-anak mulai terlihat kembali ke rumah mereka yang hangus pasca kebakaran di kawasan kumuh di Manila, Filipina, pada Rabu (20/12).